



RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, maka dengan Undang-Undang ini kita dapat mengetahui satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai Pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272- 273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional secara sistematis, terarah, menyeluruh, terukur dan tanggap terhadap perubahan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 diikuti dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, oleh karenanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan mempedomani pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta program Asta Cita serta dalam rangka implementasi 136 program prioritas/intervensi/aksi/taktis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat” dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah fokus dan mendukung pada program intervensi yaitu digitalisasi manajemen kearsipan dan pada peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyempurnaan layanan kearsipan dinamis berbasis TI dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
- 28.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

- jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
 40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja (RENJA) Perubahan Tahun 2025, dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Renja perubahan Tahun 2025 yaitu :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah untuk menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, penyusunan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- 2) Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ke dalam rencana operasional tahunan;
- 3) Menjadi acuan, Pedoman dan alat ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas dan jelas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

Memuat capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) dan perkiraan capaian sampai dengan akhir tahun 2025. Kemudian pencapaian target akhir renja Tahun 2025 dan Renstra tahun 2024 – 2026.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat perumusan tujuan dan sasaran perubahan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Kemudian menjabarkan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2025 yang kemungkinan mengalami perubahan dan atau perkiraan maju di tahun 2026.

BAB IV PENUTUP.

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya ditujukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, ketercapaian maupun hambatan yang dihadapi PD sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menerima Anggaran guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2025, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan memiliki total anggaran sebesar Rp35.938.434.000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp34.939.637.000,- (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp998.797.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Belanja Operasi terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp28.166.502.000,- (Dua puluh delapan milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.773.135.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) indikator program telah melebihi target RKPD 2025 yaitu Persentase arsip yang diselamatkan dengan capaian 120,32% melebihi target 100% dan Nilai survey kepuasan masyarakat dengan capaian 106,25% melebihi target 100%; sebanyak 9 (sembilan) indikator program akan tercapai di Triwulan IV tahun 2025 diantaranya Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya dengan target 30,26%; Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK dengan target 100%; Persentase peningkatan pengunjung arsip dengan target 79%; Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip dengan target 20%; Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi dengan target 88,89%; Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca dengan target 61,54; Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan target 92,25%; Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah dengan target 100 % dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah dengan target 100%.

Faktor yang mempengaruhi beberapa indikator kinerja dapat melebihi target Tahun 2025 yaitu dikarenakan adanya permintaan fasilitasi penyelamatan arsip bencana di kab. kendal dan kab. kudus. Sedangkan indikator yang akan tercapai di triwulan IV tahun 2025 dikarenakan kegiatan masih berlangsung.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yaitu perlu monitoring dalam rangka pencapaian target kinerja baik target Tahun 2025 maupun target akhir Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian Renja terhadap target akhir Renstra serta pergeseran dan usulan penambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat mengungkit capaian kinerja di akhir Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, berikut dapat kami sajikan matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan s/d Triwulan I Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan s/d Triwulan I Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target Indika tor Lainn ya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024- 2026 s/d Tahun 2025
						Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEARSIPAN								
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	32,89%	38,15%		30,26%	26,36%	87,11%	30,26%
	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	25 unit	29 unit		23 unit	20 unit	65%	23 unit
	Sub keg. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	75 laporan	76 laporan		-	-	-	-
	Sub keg. Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	117 laporan	-		117 laporan	41 laporan	35,04%	117 laporan
	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	100%	95%		85,36%	73,17%	85,72%	85,36%

	Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD							
	Sub keg. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	41 laporan	42 laporan		41 laporan	41 laporan	100%	41 laporan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100%	178,26%		100%	21,23%	21,23%	100%
	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	4.500 arsip	2.219 arsip		1.500 arsip	274 arsip	18,27%	1.500 arsip
	Sub keg. Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	4.500 arsip	2.219 arsip		1.750 arsip	274 arsip	15,66%	1.750 arsip
	Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	36.370 dokumen	14.135 arsip		13.000 dokumen	2.903 dokumen	24,19%	13.000 dokumen
	Sub keg. Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	4.500 arsip	1.507 arsip		1.500 arsip	400 arsip	26,67%	1.500 arsip
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	33.370 arsip	12.321 arsip		11.500 arsip	2.503 arsip	21,77%	11.500 arsip
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	3.000 arsip	2.274 arsip		1.250 arsip	343 arsip	27,44%	1.250 arsip
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengunjung arsip	100%	35,60%		79%	39%	49,37%	79%
	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah arsip yang terlayankan	3.000 arsip	970 arsip		1.000 arsip	369 arsip	36,90%	1.000 arsip
	Sub keg. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	9.750 pengguna	3.861 pengguna		3.250 pengguna	623 pengguna	19,17%	3.250 pengguna

	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	123 unit	41 unit		41 unit	0 unit	0%	41 unit
	Sub keg. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	12 laporan	4 laporan		4 laporan	0 laporan	0%	4 laporan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang diselamatkan	100%	25,97%		65,92%	79,32%	120,33%	79,32%
	Keg. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	1.500 arsip	175 arsip		500 arsip	610 arsip	122%	610 arsip
	Sub keg. Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	1.500 arsip	400 arsip		600 arsip	610 arsip	101,67%	610 arsip
	Keg. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	283.370 arsip	265.217 arsip		272.000 arsip	73.508 arsip	27,03%	272.000 arsip
	Sub keg. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	33.370 arsip	10.019 arsip		12.000 arsip	5.508 arsip	45,90%	12.000 arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	22,50%	12,50%		20%	12,5%	62,50%	20%
	Keg. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10	9 OPD	5 OPD		8 OPD	5 OPD	62,50%	8 OPD

	Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	tahun)							
	Sub keg. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	30.000 arsip	12.260 arsip		10.000 arsip	503 arsip	5,03%	10.000 arsip
	PERPUSTAKAAN								
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai survey kepuasan masyarakat	80 nilai	85 nilai		80 nilai	85 nilai	106,25%	80 nilai
	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	12 jenis	6 jenis		10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis
	Sub keg. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5 jenis	5 jenis		5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis
	Sub keg. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit
	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	15%	5.9%		5%	1,5%	30%	5%
	Sub keg. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	33.000 eksemplar	11.588 eksemplar		9.500 eksemplar	2.500 eksemplar	26,32%	9.500 eksemplar
	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	60 orang	20		20 orang	0 orang	0%	20 orang

	Sub keg. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit
	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	7.971.000 orang	3.073.789 orang		2.657.000 orang	738.640 orang	27,80%	2.657.000 orang
	Sub keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	21 unit	7 unit		7 unit	0 unit	0%	7 unit
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	100%	83,33%		88,89%	83,33%	93,75%	88,89%
	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	25 unit	5 unit		8 unit	0 unit	0%	8 unit
	Sub keg. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	10 unit	4 unit		3 unit	0 unit	0%	3 unit
	Sub keg. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	60 orang	10 orang		20 orang	0 orang	0%	20 orang
	Sub keg. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang	15 unit	7 unit		5 unit	0 unit	0%	5 unit

	Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan							
	Sub keg. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	75 orang	15 orang		30 orang	0 orang	0%	30 orang
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	100%	23,08%		61,54%	23,08%	37,50%	61,54%
	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	9 kegiatan	2 kegiatan		3 kegiatan	0 kegiatan	0%	3 kegiatan
	Sub keg. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	13 lokasi	3 lokasi		5 lokasi	0 lokasi	0%	5 lokasi
	Sub keg. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	40 orang	8 orang		12 orang	0 orang	0%	12 orang
	Sub keg. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah	Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 orang			1 orang	0 orang	0%	1 orang

Provinsi									
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	100%	86%		92,25%	88,18%	95,59%	92,25%
	Keg. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	214 unit	184 unit		194 unit	186 unit	95,88%	194 unit
	Sub keg. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	8.100 eksemplar	3.038 eksemplar		2.700 eksemplar	900 eksemplar	33,33%	2.700 eksemplar
	Sub keg. Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	9 unit	3 unit		3 unit	0 unit	0%	3 unit
	Keg. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	6 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen
	Sub keg. Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	13.350 dokumen	4.400 dokumen		4.450 dokumen	1.075 dokumen	24,16%	4.450 dokumen
	Sub keg. Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Keg. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	42 eksemplar	25 eksemplar		32 eksemplar	19 eksemplar	76%	25 eksemplar
	Sub keg. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah	Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	22 eksemplar	5 eksemplar		7 eksemplar	0 eksemplar	0%	7 eksemplar

	Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	dilestarikan dan didayagunakan							
	Keg. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	875 eksemplar	374 eksemplar		593 eksemplar	437 eksemplar	73,69%	593 eksemplar
	Sub keg. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	15 eksemplar	3 eksemplar		5 eksemplar	0 eksemplar	0%	5 eksemplar
	Sub keg. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	675 eksemplar	174 eksemplar		225 eksemplar	63 eksemplar	28%	225 eksemplar
	Non Urusan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%	25%	25%	100%
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Sub keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	140 orang	146 orang		145 orang	140 orang	96,55%	145 orang
	Sub keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen

	Daerah	daerah pada perangkat daerah							
	Sub keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen
	Sub keg. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%	100%		100%	25%	25%	100%
	Sub keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	1 paket		0 paket	0 paket	100%	0 paket
	Sub keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Sub keg. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Sub keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	5 orang		10 orang	0 orang	0%	10 orang
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%	100%		100%	25%	25%	100%
	Sub keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Sub keg. Penyediaan	Jumlah paket peralatan dan	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan							
	Sub keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket		1 paket	0 paket	0%	1 paket
	Sub keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Sub keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Sub keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material	3 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Sub keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 laporan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
	Sub keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	3 laporan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
	Sub keg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	3 laporan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
	Sub keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	3 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	173 unit	18 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit

	Sub keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Sub keg. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 paket	1 paket		0 paket	0 paket	100%	0 paket
	Sub keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	17 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Sub keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24 laporan	8 laporan		8 laporan	0 laporan	0%	8 laporan
	Sub keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
	Sub keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	9 laporan	3 laporan		3 laporan	0 laporan	0%	3 laporan
	Sub keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan
	Sub keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	3 laporan		3 laporan	0 laporan	0%	3 laporan
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	405 unit	154 unit		50 unit	6 unit	12%	50 unit

		dilakukan pemeliharaan							
	Sub keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	2 unit		2 unit	1 unit	50%	2 unit
	Sub keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 unit	15 unit		15 unit	5 unit	33,33%	15 unit
	Sub keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	16 unit		4 unit	3 unit	75%	4 unit
	Sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	4 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	0 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 unit	227 unit		0 unit	0 unit	100%	0 unit
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat	100%	100%		100%	25%	25%	100%

		daerah							
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100%	100%		100%	25%	25%	100%
	Sub keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	3 dokumen		3 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen
	Sub keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan		5 laporan	3 laporan	60%	5 laporan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam Bab III akan kami sampaikan rencana kerja dan pendanaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target 2025	
					Renja PD	Perubahan Renja PD
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15.62	15.45
		Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	74	75.1
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	95	96.17
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan LKD Provinsi	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Nilai	95.57	97.19
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74	73.58
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	81
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.02	3.03

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Internalisasi 136 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang pada table di bawah ini:

Tabel 3.2
Penjabaran Implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program Intervensi	Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Digitalisasi Manajemen Arsip	<p>1. Evaluasi optimalisasi implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan secara elektronik</p> <p>2. Upgrade system Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang diubah namanya menjadi SiArtis untuk mendukung pengelolaan dan layanan arsip statis</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</p> <p>1. Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</p>
		Pengolahan Arsip statis dengan system Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang diubah namanya menjadi SiArtis	<p>2. Kegiatan: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan: Akuisisi Arsip Statis</p>
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	<p>3. Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan</p>

No	Program Intervensi	Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Nasional Tingkat Provinsi Sub Kegiatan: Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
		1. Alih media arsip statis 2. Upgrade aplikasi arsip EMas untuk mendukung penyimpanan arsip masyarakat (yang dilakukan langsung sendiri oleh masyarakat) guna menghindari kerusakan arsip akibat bencana	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Kegiatan: Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi Sub Kegiatan: Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Tabel 3.3

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2025						Prakiraan Maju Tahun 2026		Lokasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab /Unit Kerja
								Target			Pagu (Rp)			Target	Rp.	Renja PD	P-Renja PD	
								Renja PD	APBD	P-Renja PD	Renja PD	APBD	P-Renja PD					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah											33.389.359.000	33.917.951.000	31.123.795.000		37.406.320.000			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74	74	73,58				75				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											33.389.359.000	33.917.951.000	31.123.795.000		37.056.320.000			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	81	81	33.214.359.000	33.742.951.000	31.035.061.000	82	37.056.320.000			

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								33.214.3 59.000	33.742.9 51.000	31.035.0 61.000		37.056.3 20.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	33.214.3 59.000	33.742.9 51.000	31.035.0 61.000	100	37.056.3 20.000			
		X.XX.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27.887.9 10.000	28.416.5 02.000	26.360.6 22.000		26.889.3 50.000			
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	2788791 0000	2841650 2000	26.360.6 22.000	1	26.889.3 50.000			SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1 .02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27.637.9 10.000	28.166.5 02.000	26.124.5 64.000		26.539.3 50.000			
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	145	145	145	27.637.9 10.000	28.166.5 02.000	26.124.5 64.000	140	26.539.3 50.000			SUB BAGIAN KEUANGAN

		X.XX.01.1 .02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						250.000. 000	250.000. 000	236.058. 000		350.000. 000			
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok ume n	1	1	1		250.000. 000	250.000. 000	236.058. 000	1	350.000. 000			SUB BAGIAN KEUANG AN
		X.XX.01.1 .03		Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah							95.000.0 00	95.000.0 00	91.708.0 00		305.000. 000			
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok ume n	1	1	1		9500000 0	9500000 0	91.708.0 00	1	305.000. 000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						90.000.0 00	90.000.0 00	89.508.0 00		300.000. 000			
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok ume n	1	1	1		90.000.0 00	90.000.0 00	89.508.0 00	1	300.000. 000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.00 0	5.000.00 0	2.200.00 0		5.000.00 0			

					Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	2.200.000	1	5.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						61.000.000	61.000.000	22.694.000		190.000.000			
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100	61000000	61000000	22.694.000	100	190.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-	-	-		-			
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	-	-	-	0	-			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000	5.000.000	2.460.000		50.000.000			

					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	2.460.000	1	50.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10.000.000	10.000.000	5.234.000		40.000.000			
					Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	1	1	10.000.000	10.000.000	5.234.000	1	40.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					46.000.000	46.000.000	15.000.000		100.000.000			
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	10	40	46.000.000	46.000.000	15.000.000	10	100.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Adminis trasi Umum Perangkat Daerah						1.074.000.000	1.074.000.000	560.230.000		1.635.000.000			

					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100	1074000000	1074000000	560.230.000	100	1.635.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000	30.000.000	29.825.000		60.000.000			
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	30.000.000	30.000.000	29.825.000	1	60.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000	40.000.000	34.692.000		100.000.000			
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	40.000.000	40.000.000	34.692.000	1	100.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.000.000	5.000.000	4.888.000		45.000.000			
					Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	1	1	1	5.000.000	5.000.000	4.888.000	1	45.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN

					yang disediakan													KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					200.000. 000	200.000. 000	131.615. 000		170.000. 000				
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pake t	1	1	1	200.000. 000	200.000. 000	131.615. 000	1	170.000. 000				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.000.0 00	25.000.0 00	14.355.0 00		100.000. 000				
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pake t	1	1	1	25.000.0 00	25.000.0 00	14.355.0 00	1	100.000. 000				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					9.000.00 0	9.000.00 0	6.070.00 0		35.000.0 00				
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dok ume n	1	1	1	9.000.00 0	9.000.00 0	6.070.00 0	1	35.000.0 00				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .06.0007			Penyediaan Bahan/Materi al					75.000.0 00	75.000.0 00	38.193.0 00		180.000. 000				

					jumlah paket bahan/material	Paket	1	1	1	75.000.000	75.000.000	38.193.000	1	180.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu					175.000.000	175.000.000	73.980.000		300.000.000			
					Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	1	1	175.000.000	175.000.000	73.980.000	1	300.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400.000.000	400.000.000	147.600.000		550.000.000			
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1	1	400.000.000	400.000.000	147.600.000	1	550.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.000.000	15.000.000	7.800.000		45.000.000			
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1	15.000.000	15.000.000	7.800.000	1	45.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

		X.XX.01.1 .06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000	100.000.000	71.212.000		50.000.000			
					Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1		100.000.000	100.000.000	71.212.000	1	50.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1 .07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200.000.000	-	249.200.000		2.150.000.000			
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	38	38	12		200000000	0	249.200.000	118	2.150.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1 .07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						-	-	-		-			

					atau Lapangan												
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	0	0	-	-	-	0	-			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1 .07.0005			Pengadaan Mebel					-	-	-		500.000.000			
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	0	0	-	-	-	1	500.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1 .07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000.000	-	249.200.000		450.000.000			
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1	12	200.000.000	-	249.200.000	5	450.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1 .07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	-	-		1.200.000.000			

						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	-	-	-	1	1.200.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.661.000.000	3.661.000.000	3.243.600.000		4.045.000.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	8	8	1	3661000.000	3661000.000	3.243.600.000	8	4.045.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat							10.000.000	10.000.000	3.000.000		35.000.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	3.000.000	1	35.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.900.000		2.000.000.000			

					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	1	1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.900.000	3	2.000.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					86.000.000	86.000.000	56.000.000		10.000.000			
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	86.000.000	86.000.000	56.000.000	1	10.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.265.000.000	2.265.000.000	2.134.700.000		2.000.000.000			
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3	1	2.265.000.000	2.265.000.000	2.134.700.000	3	2.000.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						235.449.000	435.449.000	507.007.000		1.841.970.000			

				Pemerintah Daerah														
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	50	83	235449000	435449000	507.007.000	135	1.841.970.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000	35.000.000	20.000.000		80.000.000			
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	2	35.000.000	35.000.000	20.000.000	2	80.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		X.XX.01.1 .09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000. 000	100.000. 000	104.786. 000		175.000. 000				
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	15	15	100.000. 000	100.000. 000	104.786. 000	15	175.000. 000				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.449. 000	270.449. 000	314.406. 000		150.000. 000				
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	55	100.449. 000	270.449. 000	314.406. 000	3	150.000. 000				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN
		X.XX.01.1 .09.0009			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	30.000.0 00	62.815.0 00		1.246.97 0.000				

					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Unit	0	0	3	-	30.000.000	62.815.000	5	1.246.970.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	-	-		70.000.000			
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	-	-	-	30	70.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	-	5.000.000		120.000.000			
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Unit	0	0	1	-	-	5.000.000	4	120.000.000			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah										175.000.000	175.000.000	88.734.000		350.000.000			Dinas Kearsipn dan Perpustakaan
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,02	3,02	3,03	175.000.000	175.000.000	88.734.000	3,03	350.000.000			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								175.000.000	175.000.000	88.734.000		350.000.000			
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	175.000.000	175.000.000	88.734.000	100	350.000.000			
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								175.000.000	175.000.000	88.734.000		350.000.000			

					Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	1750000.00	1750000.00	88.734.000	100	350.000.000			SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					135.000.000	135.000.000	69.062.000		250.000.000			
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	6	135.000.000	135.000.000	69.062.000	4	250.000.000			SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000	40.000.000	19.672.000		100.000.000			
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	5	5	40.000.000	40.000.000	19.672.000	5	100.000.000			SUB BAGIAN PROGRAM
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan										771.598.000	771.598.000	401.883.000		2.326.461.000			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	95	95	96,17				96				

	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi										771.598.000	771.598.000	401.883.000		2.326.461.000			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai	95,57	95,57	97,19		771.598.000	771.598.000	401.883.000	96,1	2.326.461.000			
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								701.598.000	701.598.000	366.751.000		2.081.845.000			
					Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	30,26	30,26	42,1		220.000.000	220.000.000	104.910.000	32,89	725.000.000			
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinami							120.000.000	120.000.000	57.422.000		375.000.000			

				s Provinsi														
						Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkatkan nilai pengawasan kearsipannya	Unit	23	23	23	1200000 00	1200000 00	57.422.0 00	25	375.000. 000			SEKSI PENGAW ASAN KEARSIP AN
		2.24.02.1. 01.0003			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi						-	-	-		375.000. 000			
						Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	Lapo ran	0	0	0	-	-	-	75	375.000. 000			SEKSI PENGAW ASAN KEARSIP AN
		2.24.02.1. 01.0012			Penyelenggara an pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						120.000. 000	120.000. 000	57.422.0 00	-	-			
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lem baga	117	117	117	120.000. 000	120.000. 000	57.422.0 00	-	-			SEKSI PENGAW ASAN KEARSIP AN
		2.24.02.1. 03			Pengelol aan Simpul Jaringa n dalam Sistem						100.000. 000	100.000. 000	47.488.0 00		350.000. 000			

				Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi														
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	85,36	85,36	85,36	100000000	100000000	47.488.000	100	350.000.000			SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						100.000.000	100.000.000	47.488.000		350.000.000			
					Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	41	41	41		100.000.000	100.000.000	47.488.000	41	350.000.000			SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN
					Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	100	100		245.000.000	245.000.000	130.228.000	100	606.845.000			
		2.24.02.1.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						25.000.000	25.000.000	12.435.000		30.470.000			

					Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	1500	1500	1500	25000000	25000000	12.435.000	1500	30.470.000			SEKSI AKUISISI ARSIP
		2.24.02.1.01.0004			Penyusutan Arsip Dinamis					25.000.000	25.000.000	12.435.000		30.470.000			
					Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Arsip	1750	1750	1750	25.000.000	25.000.000	12.435.000	1500	30.470.000			SEKSI AKUISISI ARSIP
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						220.000.000	220.000.000	117.793.000		576.375.000			
					Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	12000	12000	13000	22000000	22000000	117.793.000	12370	576.375.000			SEKSI PENGOLAHAN ARSIP
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis					220.000.000	220.000.000	117.793.000		576.375.000			
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1250	1250	1500	50.000.000	50.000.000	22.235.000	1500	140.000.000			SEKSI PENGOLAHAN ARSIP
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	1500	1500	70.000.000	70.000.000	48.553.000	11370	400.000.000			SEKSI PENGOLAHAN ARSIP
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	11500	11500	11500	100.000.000	100.000.000	47.005.000	1000	36.375.000			SEKSI PENGOLAHAN ARSIP
					Persentase peningkatan	%	79	79	79	236.598.000	236.598.000	131.613.000	100	750.000.000			

						pengunjung arsip												
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi							236.598.000	236.598.000	131.613.000		750.000.000			
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	1000	1000	1000	75000000	75000000	35.848.000	1000	300.000.000			SEKSI LAYANAN ARSIP
		2.24.02.1.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN							75.000.000	75.000.000	35.848.000		-			
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	1 peta k /tahun	3250	3250	3250	75.000.000	75.000.000	35.848.000	-	-			SEKSI LAYANAN ARSIP

					Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	41	41	161598000	161598000	95.765.000	41	450.000.000			SEKSI PEMANFAATAN ARSIP
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi					161.598.000	161.598.000	95.765.000		450.000.000			
					Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	4	4	4	161.598.000	161.598.000	95.765.000	4	450.000.000			SEKSI PEMANFAATAN ARSIP
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							70.000.000	70.000.000	35.132.000		244.616.000			
					Persentase arsip yang diselamatkan	%	65,92	65,92	65,92	45.000.000	45.000.000	22.430.000	100	120.756.000			
		2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat							25.000.000	25.000.000	15.152.000		50.000.000			

				Bencana yang Berskala Provinsi														
						Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	500	500	500	25000000	25000000	15.152.000	500	50.000.000			SEKSI PELESTARIAN ARSIP
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						25.000.000	25.000.000	15.152.000		50.000.000			
					Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	600	600	600	25.000.000	25.000.000	15.152.000	500	50.000.000			SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.04			Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga						20.000.000	20.000.000	7.278.000		70.756.000			

				Kearsipan Provinsi														
						Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	272 000	272 000	272 000	2000000 0	2000000 0	7.278.00 0	283 370	70.756.0 00			SEKSI PELESTARIAN ARSIP
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						20.000.0 00	20.000.0 00	7.278.00 0		70.756.0 00			
					Jumlah daftar arsip yg dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	120 00	120 00	120 00	20.000.0 00	20.000.0 00	7.278.00 0	113 70	70.756.0 00			SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
					Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	20	20	20	25.000.0 00	25.000.0 00	12.702.0 00	22,5	123.860. 000				

		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						25.000.000	25.000.000	12.702.000		123.860.000			
					Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	8	8	8	25000000	25000000	12.702.000	9	123.860.000			SEKSI AKUISISI ARSIP
		2.24.03.1.01.0001		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						25.000.000	25.000.000	12.702.000		123.860.000			
					Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan	Arsip	10000	10000	10000	25.000.000	25.000.000	12.702.000	10000	123.860.000			SEKSI AKUISISI ARSIP

						pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun											
Meningkatkan Literasi Masyarakat											1.640.000.000	2.640.000.000	2.370.818.000		3.113.804.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15,62	15,62	15,45				17,5			
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat											1.640.000.000	2.640.000.000	2.370.818.000		3.113.804.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	74	74	75,1	1.640.000.000	2.640.000.000	2.370.818.000	75	3.113.804.000		
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								1.400.000.000	2.400.000.000	2.238.809.000		2.693.500.000		
						Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	80	85,1	1.105.000.000	1.806.744.000	1.816.756.000	80	1.558.500.000		
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat							640.000.000	690.000.000	658.365.000		1.463.500.000		

				Daerah Provinsi														
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jeni s	10	10	10	9000000 0	1400000 00	129.113. 000	12	400.000. 000			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI
		2.23.02.1. 01.0007			Pengembang an Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						40.000.0 00	72.000.0 00	65.413.0 00		350.000. 000			
					Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangka n melalui peningkatan koleksi	Jeni s	5	5	5	40.000.0 00	72.000.0 00	65.413.0 00	5	350.000. 000			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1. 01.0015			Pengembang an dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						50.000.0 00	68.000.0 00	63.700.0 00		50.000.0 00			
					Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen	Unit	1	1	1	50.000.0 00	68.000.0 00	63.700.0 00	1	50.000.0 00			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	

						layanan TIK berbasis ISO 20000											
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	5	5	3	550000000	550000000	529.252.000	5	1.063.500.000		SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						550.000.000	550.000.000	529.252.000		1.063.500.000		
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eks	9500	9500	5942		550.000.000	550.000.000	529.252.000	12000	1.063.500.000		SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							465.000.000	1.116.744.000	1.158.391.000		95.000.000		
					Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	20	20	20		30000000	681744000	736.770.000	20	50.000.000		SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI

		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						30.000.000	681.744.000	736.770.000		50.000.000			
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Unit	1	1	1		30.000.000	681.744.000	736.770.000	1	50.000.000			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI
					Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	265700	265700	265700		43500000	43500000	421.621.000	265700	45.000.000			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI
		2.23.02.1.02.0002			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						435.000.000	435.000.000	421.621.000		45.000.000			
					Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Unit	7	7	7		435.000.000	435.000.000	421.621.000	7	45.000.000			SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI

						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	88,89	88,89	88,89	180.000.000	180.000.000	98.703.000	100	775.000.000			
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi							180.000.000	180.000.000	98.703.000		775.000.000			
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	8	8	8	80000000	80000000	40.112.000	9	430.000.000			SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN
		2.23.02.1.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi							50.000.000	50.000.000	26.094.000		180.000.000			
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Unit	3	3	3	50.000.000	50.000.000	26.094.000	4	180.000.000			SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN

		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						30.000.000	30.000.000	14.018.000		250.000.000			
					Jumlah data dan informasi perpustakaan	Dokumen	1	1	1		30.000.000	30.000.000	14.018.000	1	250.000.000			SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN
					Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	20	20	20		100000000	100000000	58.591.000	20	345.000.000			SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						25.000.000	25.000.000	11.538.000		120.000.000			
					Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan	Unit	5	5	5		25.000.000	25.000.000	11.538.000	5	120.000.000			SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

					provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan													
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi					75.000.000	75.000.000	47.053.000		225.000.000				
					Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Orang	30	30	25	75.000.000	75.000.000	47.053.000	25	225.000.000				SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
					Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	61,54	61,54	61,54	115.000.000	413.256.000	323.350.000	100	360.000.000				

		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							115.000.000	413.256.000	323.350.000								
					Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	3	3	3		115000000	413256000	323.350.000	3						SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat							60.000.000	358.256.000	280.804.000								
					Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Lokasi	5	5	13		60.000.000	358.256.000	280.804.000	5							SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						30.400.000	30.400.000	25.496.000		100.000.000			
					Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Orang	12	12	12		30.400.000	30.400.000	25.496.000	20	100.000.000			SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi						24.600.000	24.600.000	17.050.000		60.000.000			
					Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	1	1		24.600.000	24.600.000	17.050.000	1	60.000.000			SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								240.000.000	240.000.000	132.009.000		420.304.000			

						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	92,25	92,25	92,25	240.000.000	240.000.000	132.009.000	100	420.304.000			
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi							80.000.000	80.000.000	44.872.000		136.500.000			
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Unit	194	194	194	80000000	80000000	44.872.000	214	136.500.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.01.0001		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam							20.000.000	20.000.000	10.045.000		23.500.000			
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta	Eks	2700	2700	3000	20.000.000	20.000.000	10.045.000	2800	23.500.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN

					Kepatuhan Serah Simpan KCKR												PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					60.000.000	60.000.000	34.827.000		113.000.000			
					Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Unit	3	3	6	60.000.000	60.000.000	34.827.000	3	113.000.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						50.000.000	50.000.000	21.334.000		79.976.000			

					Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	2	2	50000000	50000000	21.334.000	2	79.976.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah					35.000.000	35.000.000	15.314.000		51.988.000			
					Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	Dokumen	4450	4450	4500	35.000.000	35.000.000	15.314.000	4550	51.988.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah					15.000.000	15.000.000	6.020.000		27.988.000			
					Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	6.020.000	1	27.988.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						40.000.000	40.000.000	22.937.000		42.328.000			
					Jumlah koleksi naskah kuno yang	Eks	32	32	32	40000000	40000000	22.937.000	42	42.328.000			SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN

					dialihmediakan													BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.03.0002			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedi aan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						40.000.000	40.000.000	22.937.000				42.328.000	
					Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eks	7	7	5		40.000.000	40.000.000	22.937.000	10			42.328.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerin							70.000.000	70.000.000	42.866.000				161.500.000	

				Daerah Provinsi														
					Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Eks	593	593	534	7000000 0	7000000 0	42.866.0 00	875	161.500. 000				SEKSI AKUISISI DAN PENGOL AHAN BAHAN PERPUST AKAAN
		2.23.03.1. 04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					40.000.0 00	40.000.0 00	29.571.0 00		107.500. 000				
					Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	5	5	160	40.000.0 00	40.000.0 00	29.571.0 00	7	107.500. 000				SEKSI AKUISISI DAN PENGOL AHAN BAHAN PERPUST AKAAN
		2.23.03.1. 04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					30.000.0 00	30.000.0 00	13.295.0 00		54.000.0 00				

						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	225	225	160	30.000.000	30.000.000	13.295.000	282	54.000.000			SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
JUMLAH											35.800.957.000	37.329.549.000	33.896.496.000		42.846.585.000			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta program Asta Cita. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. RENJA juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sekarang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahunan tahun 2025, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan bidang kearsipan dan perpustakaan yang optimal.